



TERBENGKALAI
- Pengguna jalan melintasi lubang galian proyek saluran irigasi di jalan Babaran, Kota Yogyakarta, Selasa (3/9/2019).



TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI



Galian Tergenang Air Penuh Jentik Nyamuk

- Proyek SAH Mangkrak Sejak KPK Bongkar Kasus Suap

YOGYA, TRIBUN - Proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Babaran, Celeban, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, berhenti selama dua pekan terakhir. Hal itu seiring terbongkarnya kasus dugaan suap proyek SAH Jalan Prof. Dr. Soepomo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Berhentinya proyek SAH ini dikeluhkan oleh masyarakat sekitar maupun pengguna jalan. Mereka merasa terganggu dengan proyek yang mangkrak tersebut. Terganggu karena debu bekas galian proyek berterbaran saat terempas angin. Akses jalan pun terhambat karena hanya berfungsi separo.

● ke halaman 7

Galian Terganggu Air

• Sambungan Hal 1

Pantauan reporter Tribun Jogja di lokasi proyek Jalan Babaran, Selasa (3/9), kemarin, pengerjaan proyek SAH masih mandek. Tak ada satupun pekerja yang beraktivitas di lokasi proyek. Begitupun peralatan berat maupun peralatan ringan juga tidak berada di lokasi. Yang ada hanya pita pembatas jalan, papan peringatan pengerjaan proyek, dan sejumlah kerucut jalan.

Beberapa beton dinding saluran air masih nampak berada di sisi jalan. Setidaknya ada empat lubang bekas galian berukuran sekitar 2x2 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 meter yang dibiarkan menganga tanpa penutup. Melongok ke dalam lubang bekas galian, terdapat kubangan air yang samar-samar dipenuhi jentik nyamuknya.

"Debuinya mengganggu. Debu kadang terbawa angin saat siang hari. Belum lagi jalan jadi tersendat karena jalan tertutup separo. Sepeda motor saja kadang harus gantian melintas. Kalau mobil sudah tidak bisa masuk. Penginnya segera diselesaikan supaya normal kembali," kata Rudi, seorang pengendara motor yang melintas.

Mulyo, pemilik warung soto di Jalan Babaran, juga terpapar dampak berhentinya proyek SAH tersebut. Sudah hampir satu bulan proyek itu dimulai pada 6 Agustus lalu, selama itu pula warung soto miliknya tutup. Sampai berita ini ditulis, plang tulisan "tutup" masih dipasang di warnarnya.

"Tutup karena ada proyek saluran air. Kebetulan beberapa waktu lalu ada hajatan nikahan anak saya jadi tutup lumayan lama. Hampir satu bulan," kata Mulyo yang akrab dipanggil Bu Mul.

la, sejak 1996 berjualan soto dengan lokasi berpindah-pindah. Hingga lima tahun terakhir ini ia membuka warung soto di ruas Jalan Babaran tersebut.

Tanpa mau menyebut jumlah pemasukkan yang hilang karena warnungnya tutup, Bu Mul sendiri coba memaklumi proyek tersebut.

Ia memahami proyek tersebut adalah demi kepentingan warga seperti dirinya agar SAH lancar saat musim hujan nanti. Namun, ketika proyek tak kunjung diselesaikan, sebagai pengusaha ia juga dibuat rugi.

"Ya saya dukung saja proyek itu karena untuk kebaikan masyarakat. Tapi

ya jangan lama-lama. Karena satu-satunya cara saya mendapatkan pemasukan ya dari usaha ini. Belum lagi debuinya itu kalau siang hari ke mana-mana. Nyamuknya jadi banyak karena ada genangan air di bekas galian," kata Bu Mul, menunjukkan tangannya yang banyak bintol bekas gigitan nyamuk.

Bu Mul berencana akan tetap membuka warung soto miliknya pada 5 September, meski belum ada kejelasan kapan proyek dilanjutkan agar cepat selesai. Soal jumlah pemasukkan yang kemungkinan akan berkurang, Bu Mul memilih pasrah. "Ya gimana, sudah lama tutup. Semoga tetap lancar. Rezeki sudah ada yang mengatur," kata Bu Mul.

Ketua RT 37, Imam Sofyan, ketika dihubungi lewat telepon, menjelaskan, sejumlah tokoh masyarakat di sekitar lokasi proyek SAH Jalan Babaran akhir pekan lalu sudah diundang pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta untuk membicarakan terkait penghentian sementara proyek tersebut.

"Kami diberi penjelasan bahwa proyek saluran air memang ditutup sementara sembari melihat perkembangan penyelidikan (kasus dugaan korupsi) dari KPK. Karena jika dilanjutkan dikhawatirkan mengubah alat bukti. Kami coba memahami hal tersebut. Kami berharap tidak terlalu lama, karena aktivitas warga, terutama pemilik usaha, terganggu," kata Imam.

Rencananya, pertengahan September mendatang, Imam akan menyampaikan kondisi yang terjadi di Jalan Babaran ini kepada warga dalam pertemuan yang digelar rutin setiap bulan. Dari agenda tersebut, akan muncul respons warga terkait terhentinya proyek tersebut. Baru setelah itu, akan diputuskan bagaimana respons yang akan diambil setelah ada kesepakatan seluruh warga.

Menunggu KPK

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Selasa (3/9), menjelaskan, hingga saat ini pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih menunggu keputusan KPK terkait kelanjutan proyek SAH Jalan Prof. Dr. Soepomo Cs.

Sebagaimana diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek SAH Jalan Prof. Dr. Soepomo Yogyakarta. Ada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta, sempat diamankan

KPK, dan statusnya sebagai saksi, yakni BAS dan ALN.

Pada rangkaian OTT, KPK mengamankan 5 orang. Selain dua ASN Pemkot Yogyakarta, KPK mengamankan GYA, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Mataram); NVA, Direktur PT. Manira Arta Mandiri; ESF, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D.

KPK pun sudah menetapkan tiga tersangka. Antara lain, GYA, ESF (jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D), dan SSL (jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta). GYA selaku pemberi suap, sedangkan ESF dan SSL selaku penerima suap.

Dugaan uang suap yang sudah diserahkan kepada ESF dan SSL sekitar Rp221 juta, atau sekitar 3 persen dari 5 persen kesepakatan komitmen *fee*. Ratusan juta rupiah tersebut diberikan dalam tiga tahap, yakni pada 16 April 2019 diberikan sebesar Rp10 juta. Pada 15 Juni 2019, sebesar Rp100.870.000. Pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000. Sedangkan sisa *fee* 2 persen, direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019.

"Kami sudah berkirin surat ke KPK. Belum ada informasi lanjutan," ucapnya ditemui reporter *Tribun Jogja* di ruang kerjanya, Selasa (3/9).

Kepastian proyek SAH tersebut, kata Heroe, meliputi dua hal, yakni ditutup atau dilanjutkan. Bila bisa dilanjutkan maka sampai kapan pihaknya bisa menyelesaikan proyek tersebut. Adapun kedua putusan tersebut juga harus menunggu dari KPK. "Belum ada kepastian kapan akan ada putusan. Kami menunggu," bebernya.

Heroe menceritakan, bahwa pembangunan SAH Supomo tersebut memang dinilai penting. Pasalnya, SAH yang ada sebelumnya, kondisinya sudah rusak sehingga butuh pembenahan. "Permasalahan itu (rusak) sudah lama, makanya kita perbaiki karena banyak yang rusak," tambahnya.

Disinggung mengenai hujan yang bisa turun sewaktu-waktu, sementara kondisi jalan yang dalam kondisi "terbuka" dan mangkrak, serta keluhan warga sekitar proyek, Heroe pun memberikan jawaban.

"Kita juga khawatir. Warga juga sudah banyak mengeluhkan soal itu di media sosial. Mereka ingin segera diselesaikan. Tapi kami belum bisa bertindak sebelum ada keputusan KPK. Kami masih menunggu," jawabnya. **(sus/cur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005